

## Akhir Masa Jabatan, DPRD Kabupaten Demak Selesaikan 63 Perda dan Tetapkan Raperda Perubahan APBD 2024



### VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - DPRD Kabupaten Demak periode 2019-2024 berakhir masa baktinya, Senin (12/08/2024). Bersamaan dengan paripurna tugas tersebut, ditetapkan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024, hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Demak.

Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak yang dihadiri Wabub KH Ali Makhsum MSi dan jajaran kepala OPD itu, Ketua DPRD Kabupaten

Demak HS Fahrudin Bisri Slamet SE menyampaikan, permohonan maaf bila selama kepemimpinannya.

"Semoga yang telah terbangun dapat dilanjutkan oleh jajaran DPRD periode berikutnya. Sehingga menjadi Kabupaten Demak yang Madani, Sejahtera dan Berkelanjutan," tuturnya, didampingi Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Demak H Moh Muchlis SE MSi.

Selama lima tahun terakhir, DPRD Kabupaten Demak telah berhasil menyusun total 63 Peraturan Daerah (Perda). Secara terperinci yakni, pada tahun 2019 sebanyak 16 Perda, 2020 sebanyak 11 Perda, 2021 sebanyak 12 Perda, 2012 sebanyak 11 Perda, dan 2024 hingga Agustus sebanyak lima Perda.

"Beberapa di antaranya Perda terkait kemudahan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan BUMD. Selain itu Perda tentang pondok pesantren, jaminan kesehatan masyarakat, dan revisi Perda Kepala Desa," tuturnya.

Sebagai partner kerja Bupati sebagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak sedikit



KR-Sari Jati

Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet SE didampingi Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Demak H Moh Muchlis SE MSi.

kontribusi diberikan DPRD Kabupaten Demak. Antara lain seperti peningkatan kinerja BUMD Kabupaten Demak yang tak lepas dari fungsi pengawasan DPRD. "DPRD melalui alat kelengkapan dewan selalu mendorong agar BUMD setiap tahun selalu meningkatkan kualitas pelayanan, kerja serta

devidennya. Sehingga bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," imbuh politisi PDIP itu.

Sedangkan terkait Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024, DPRD Kabupaten Demak di akhir pengabdiannya sukses mendongkrak PAD hingga sebesar Rp 42,159 miliar.

Yakni dari semua Rp 484,450 miliar menjadi Rp 526,609 miliar.

Selain itu juga menekan pengeluaran pembiayaan daerah hingga Rp 1 miliar, dari semula Rp 3 miliar menjadi Rp 2 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan daerah bertambah Rp 52,051 miliar, dari semula Rp 72,112 miliar menjadi Rp 124,164 miliar.

Sedangkan Pendapatan Daerah pada Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024 disepakati antara Bupati dan DPRD Kabupaten Demak sebesar Rp 2,596 triliun. Dengan rincian PAD Rp 526,609 miliar, Pendapatan Transfer Rp 2,604 triliun, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 5,610 miliar.

Sementara Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 2,718 triliun. Dengan rincian Belanja Operasional 1,990 triliun, Belanja Modal Rp 295,072 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp 1 miliar.

Adapun besaran Pembiayaan Daerah disebutkan sebesar Rp 124,164 miliar, begitupun pengeluaran pembiayaan. Sehingga sisa lebih anggaran pembiayaan daerah (Silpa) adalah Rp 0 (nol rupiah). ssj

## Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp 121 Miliar

SEMARANG (KR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah gencar melakukan pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal. Produksi rokok ilegal di Jateng pada 2023 mencapai angka 6,87 persen, dan mengakibatkan Kerugian negara sebesar Rp121,77 miliar.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Sakina Rosellarsari pada Choir Competition bertema 'Gempur Rokok Ilegal' di Wisma Perdamaian Semarang, Sabtu (10/8). Menurut Sakina, Modus peredaran rokok ilegal beragam, yaitu mulai dari secara diam-diam antarorang atau kelompok, penyelundupan skala besar lewat truk pengirim barang atau jasa pengiriman paket, hingga penjualan melalui sosial media atau e-commerce.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukn Bea Cukai dan Pemprov Jawa Tengah, peredaran rokok tanpa pita cukai maupun pita cukai palsu ini tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan juga sudah beredar di desa-desa. Ilni sangat memprihatinkan. Negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Yang lebih serius lagi, rokok ilegal lebih berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui uji laboratorium," ungkap Sakina.

Menurut Sakina, penjualan rokok ilegal mudah dijangkau oleh banyak orang, termasuk anak-anak. Hal ini berpotensi meningkatkan prevalensi merokok pada anak. Untuk itu, melalui kegiatan Choir Competition 2024 ini, diharapkan dapat memberikan edukasi tentang bahaya rokok ilegal kepada masyarakat umum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengatakan, rokok merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik khusus, seperti konsumsinya yang harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. (Bdi)-d



KR-Budiono

Sekda Jateng Sumarno (berjenggot) bersama peserta Choir Competition.

## Kos Kamar Mandi Luar Tidak Kena Pajak

SALATIGA (KR) - Tempat kos dengan kamar mandi di luar (bukan kamar mandi dalam) di Kota Salatiga ke depan tidak terkena pajak. Kepala Bidang Pengelola Pendapatan, pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Salatiga, Cansio Xavier Pereira kepada KR, mengatakan sesuai dengan aturan baru nanti, kos yang kamar mandi luar tidak kena pajak.

Ia menambahkan untuk pendapatan dari pajak daerah tempat kos dan hotel di Salatiga pada tahun 2023 lalu kurang lebih Rp 140,8 juta dengan beban pajak sebesar 5 persen. Pendapatan ini diperoleh dari kos sebanyak 168 lokasi baik kamar mandi dalam maupun luar dan 23 hotel. Penerimaan pajak daerah kos dan hotel tahun 2023, Rp 140.881.875. Dikatakan, yang dinyatakan wajib pajak sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, rumah kos yang dikenakan pajak adalah yang dikategorikan layaknya hotel kelas terendah.

BPKPD Salatiga segera melakukan pendataan ulang dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk perubahan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi rumah kos. Sosialisasi pada anggaran perubahan 2024, akan dimulai di wilayah Kecamatan Tingkir Salatiga. Selanjutnya tahun 2025 dilanjutkan wilayah Kecamatan Sidorejo yang dipastikan banyak kos lantaran daerah kampus di Kota Salatiga. Dari pantauan wartawan, rumah kos di Salatiga banyak bertebaran di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Salatiga.

Perkembangan dan pembangunan rumah kos banyak dibangun di dua kecamatan, Sidorejo (kawasan kampus) dan Kecamatan Argomulyo yang dikenal dengan kawasan industri. Kepala BPKPD Salatiga Adhi Isnanto mengungkapkan dengan aturan baru tentu akan terjadi penurunan pendapatan dari pajak kos ini. "Dengan aturan baru nanti, pendapatan bisa saja turun. Karena hanya kamar yang kamar mandi dalam yang kena pajak," katanya, Senin (12/8). (Sus)-d

## DPRD dan Bupati Grobogan Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2024



### GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD dan Bupati Grobogan menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Grobogan 2024. Persetujuan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Ketua DPRD Agus Siswanto SSos MAP, bersama Wakil Ketua Ir HM Nurwibowo MSi, H Sugeng Prasetyo SE MM, dan HM Fatah SPdI bersama Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM, dalam rapat ke-23, Senin (12/8).

Rapat dihadiri anggota Forkopimda, Wakil Bupati, Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, dan para Direktur BUMD setempat. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Anggaran, Komisi-komisi dan seluruh anggota DPRD, dimana di waktu masa periode jabatan tinggal beberapa hari lagi, masih tetap berkomitmen melaksanakan rangkaian

pembahasan, hingga akhirnya memberikan persetujuan KUA-PPAS Perubahan APBD 2024.

Bupati menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi dasar Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 antara lain, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023, sangat berpengaruh terhadap struktur APBD 2024 yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pergeseran anggaran mulai dari pendapatan maupun belanja daerah. Kebijakan bagi hasil pendapatan transfer dari Pemprov kepada Pemkab Grobogan telah mengubah beberapa prioritas kegiatan, dikarenakan berkurangnya kemampuan anggaran.

Penyesuaian terhadap sumber pembiayaan di antaranya dari pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebagaimana hasil audit BPK-RI, serta penambahan pendapatan murni yang bersumber dari PAD, Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan yang sah. Juga adanya penyesuaian kebutuhan pendanaan untuk pri-

oritas pembangunan daerah, mencukupi kebutuhan belanja rutin OPD, maupun anggaran Mandatori DAU sebagaimana ketentuan yang berlaku. Secara ringkas, Bupati menguraikan Perubahan KUA-PPAS APBD 2024.

Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.837.798.917.036, Belanja Daerah sebesar Rp 2.946.924.946.057, Defisit Anggaran sebesar minus

Rp 109.126.029.021, Pembiayaan Netto, surplus sebesar Rp 109.126.029.021, "Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar nol rupiah," terangnya. Setelah nota kesepakatan Perubahan KUA-PPAS tahun 2024, lanjut Bupati, ia akan segera menindaklanjuti dengan penyampaian nota keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang rencananya akan dimohonkan waktu pada minggu keempat bulan Agustus 2024. Sehingga diharapkan penetapan Perubahan APBD 2024 dapat segera dilak-

sanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD periode yang baru nanti.

"Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Anggaran, Komisi-komisi dan seluruh anggota DPRD, di waktu masa periode jabatan tinggal beberapa hari masih tetap berkomitmen dan terus semangat dalam melakukan rangkaian pembahasan. Semoga kerja sama yang baik ini, dapat terus kita tingkatkan untuk Grobogan yang lebih sejahtera, berdaya saing, berliman dan berbudaya," harap Bupati. (Tas)-d



KR-M Taslim

Bupati Grobogan bersama pimpinan DPRD Grobogan sedang menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2024.

## Tarso-Teguh Kantongi Rekomendasi PKB

WONOGIRI (KR) - Pasangan Tarso-Kristian Teguh Suryono (Tangguh) resmi mendapatkan rekomendasi dari PKB untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Wonogiri Pilkada 2024. Salinan rekomendasi asli diterima paslon tersebut di kantor PKB Jateng Semarang. "Iya betul mas kita sudah dapat rekom itu (PKB)," ujar Tarso saat dihubungi KR via ponsel, Senin (12/8).

Tarso menerangkan, copy rekomendasi Ketum PKB itu telah diterimanya didampingi Teguh Suryono ST. Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketua DPW PKB Jateng Muhammad Yusuf Chudlor, Sabtu (10/8) di Semarang. Yang diberikan kepada kita fotokopinya. Keseluruhannya nanti bareng se-Jateng, marin ada 11 daerah (yang diberi rekom,red). Resmi, sudah fotokopi asli," kata dia.

Dengan adanya rekomendasi dari PKB, pasangan dengan akronim 'Tangguh' itu telah mendapatkan rekomendasi dari dua parpol pemilik kursi DPRD Wonogiri. Sebelumnya, Tangguh telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. "Kita berterima kasih kepada Demokrat dan PKB yang telah memberikan kepercayaan dengan pemberian rekom. Mengusung pasangan Tangguh di Wonogiri," papar Tarso. (Dsh)-d



KR-Djoko Santoso HP

Pasangan Tarso-Kristian Teguh Suryono menerima rekomendasi dari PKB di Semarang.



## Komisi B Ingin Majukan Sistem Pertanian di Jateng

GUNA mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian, Komisi B DPRD Jateng melakukan konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (9/8). Di Kemendagri Komisi B berdiskusi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah (Dit. PHD). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni usai kunjungan kerjanya ke Kemendagri. Menurut Sri Marnyuni, Raperda disusun sebagai upaya untuk memajukan sektor pertanian khususnya pertanian organik di Jateng.

Di Kemendagri Komisi B berdiskusi soal Raperda Penyelenggaraan Sistem Pertanian yang sedang disusun. Harapannya, dari hasil konsultasi ini, penyusunan Raperda bisa segera rampung, sehingga bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar dapat bermanfaat sekaligus memajukan sektor pertanian di Jateng.



KR-Budiono

Dalam kunjungan tersebut Komisi B mendapat apresiasi dari Dit PHD, karena begitu semangat untuk bisa merampungkan Perda tersebut. Dit PHD menyarankan agar Komisi B juga melakukan konsultasi lebih detail ke Kementerian Pertanian agar isi raperda lebih komprehensif. Dit PHD juga menyarankan, keinginan Komisi B DPRD Jateng yang ingin memajukan pertanian organik, tetapi cukup dimasukkan dalam bagian Raperda saja, sehingga Raperda isinya tidak seluruhnya membahas soal pertanian organik. Dengan demikian Raperda mampu mencakup sektor pertanian secara keseluruhan.

Dari hasil konsultasi tersebut, Komisi B akan membahas Raperda secara lebih detail lagi, terutama persoalan pemberdayaan, peningkatan, dan perlindungan yang ada di sektor pertanian Jateng. (\*)

(Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)